

MEMPERKUAT FONDASI TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ.

Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah RB Nasional
Guru Besar FIA Universitas Indonesia

Disampaikan pada acara Kongres ISEI XXII dan Seminar Nasional 2024, 19 September 2024, Solo

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan (*Reformasi Birokrasi*) dan Pembangunan



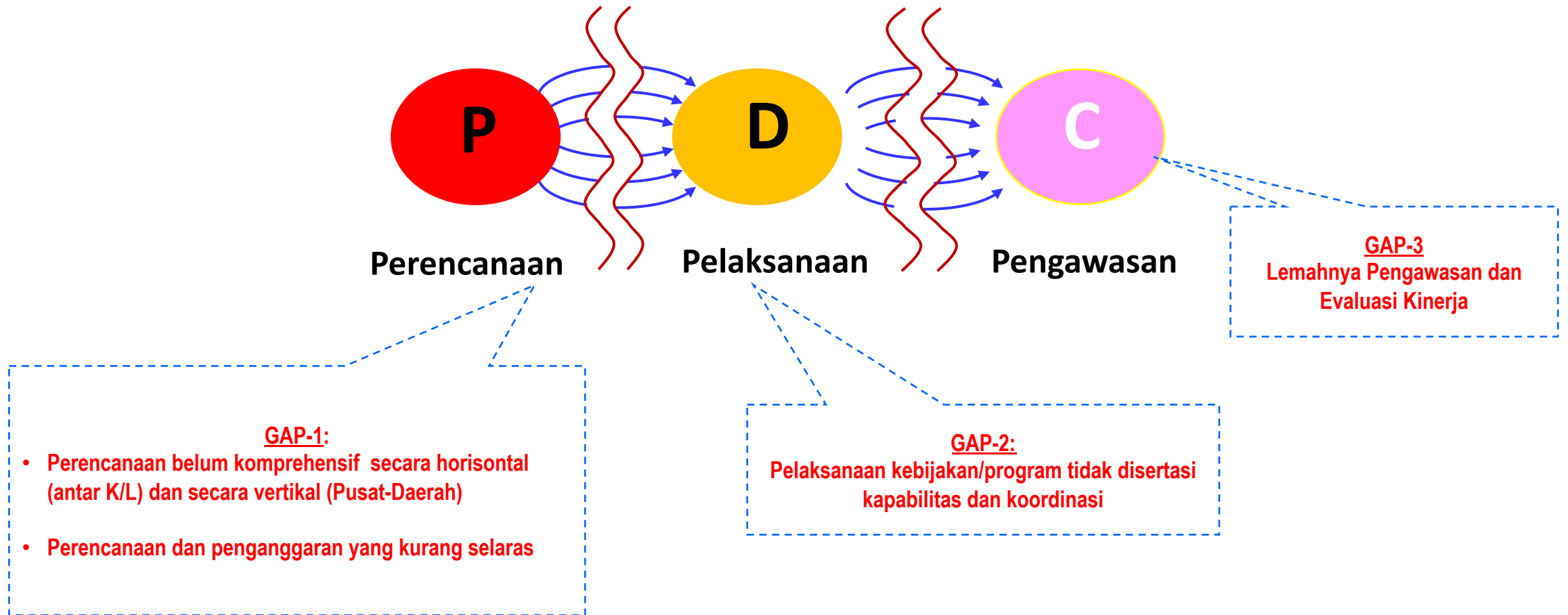
Banyak Pembangunan Gagal Karena Ketidalcukupan
Governansi yang Kapabel dan Akuntabel

TUJUH MASALAH DASAR *GOVERNANSI* DAN *INSTITUSI* DALAM PEMBANGUNAN

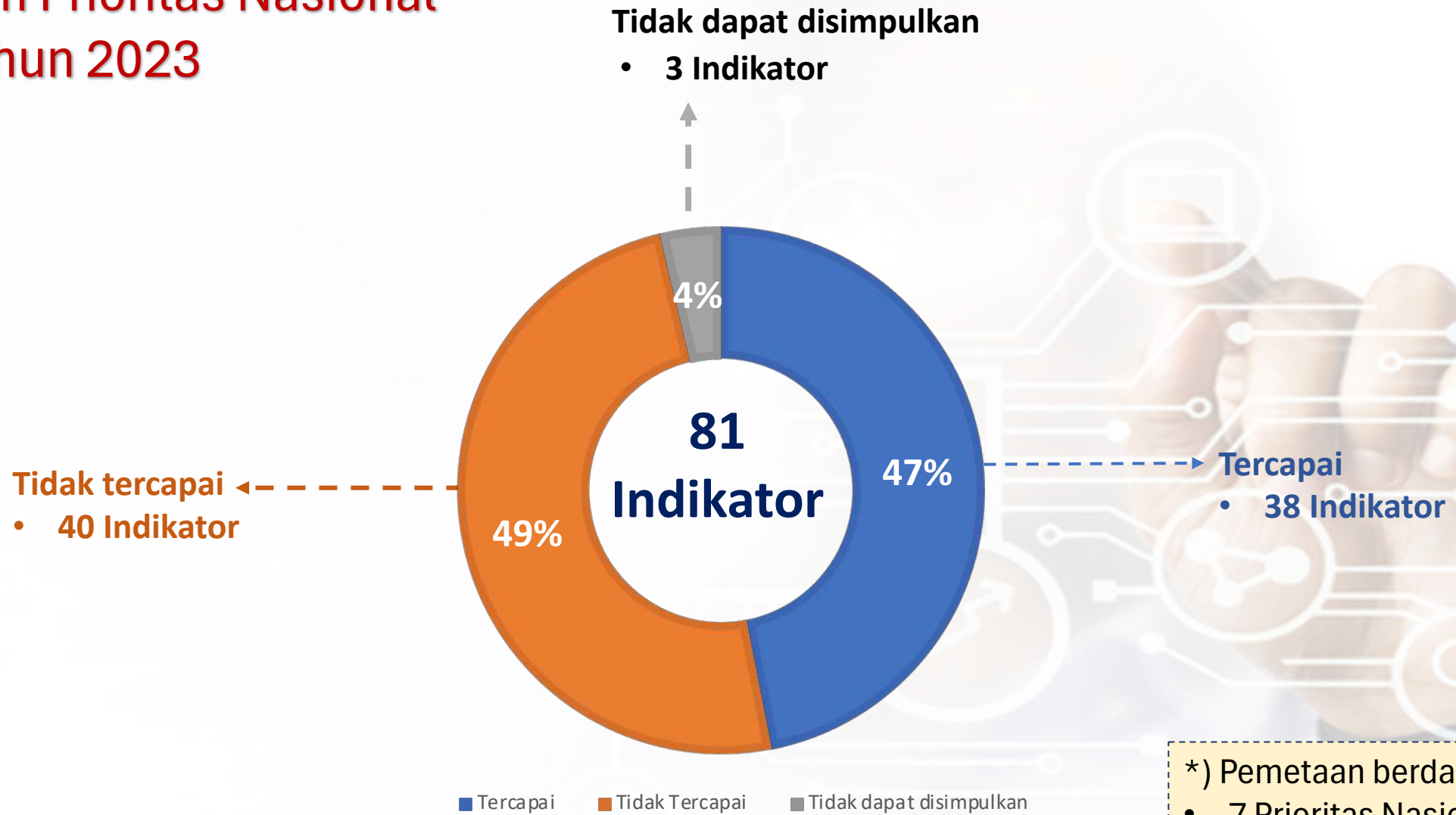
1. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang lemah (minim *Collaborative Governance*)
2. Perencanaan Pembangunan yang belum berbasis hasil dan dampak (*Less Performance based*)
3. Sinergi Pembangunan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sulit (*weak Multilevel Governance*)
4. Kapabilitas birokrasi yang lemah (*weak Dynamic Capabilities*)
5. Budaya Korupsi yang masih tinggi (*Corruptibility Culture*)
6. Kebijakan Publik belum berbasis Bukti, Data dan pengetahuan (*less evidence based Public Policy*)
7. Organisasi Pemerintah yang fragmented dan tidak berbasis outcome (*big structure, less impact*)

Kondisi Birokrasi Pemerintahan Saat ini

Kesenjangan Antara Perencanaan-Pelaksanaan-Pengawasan



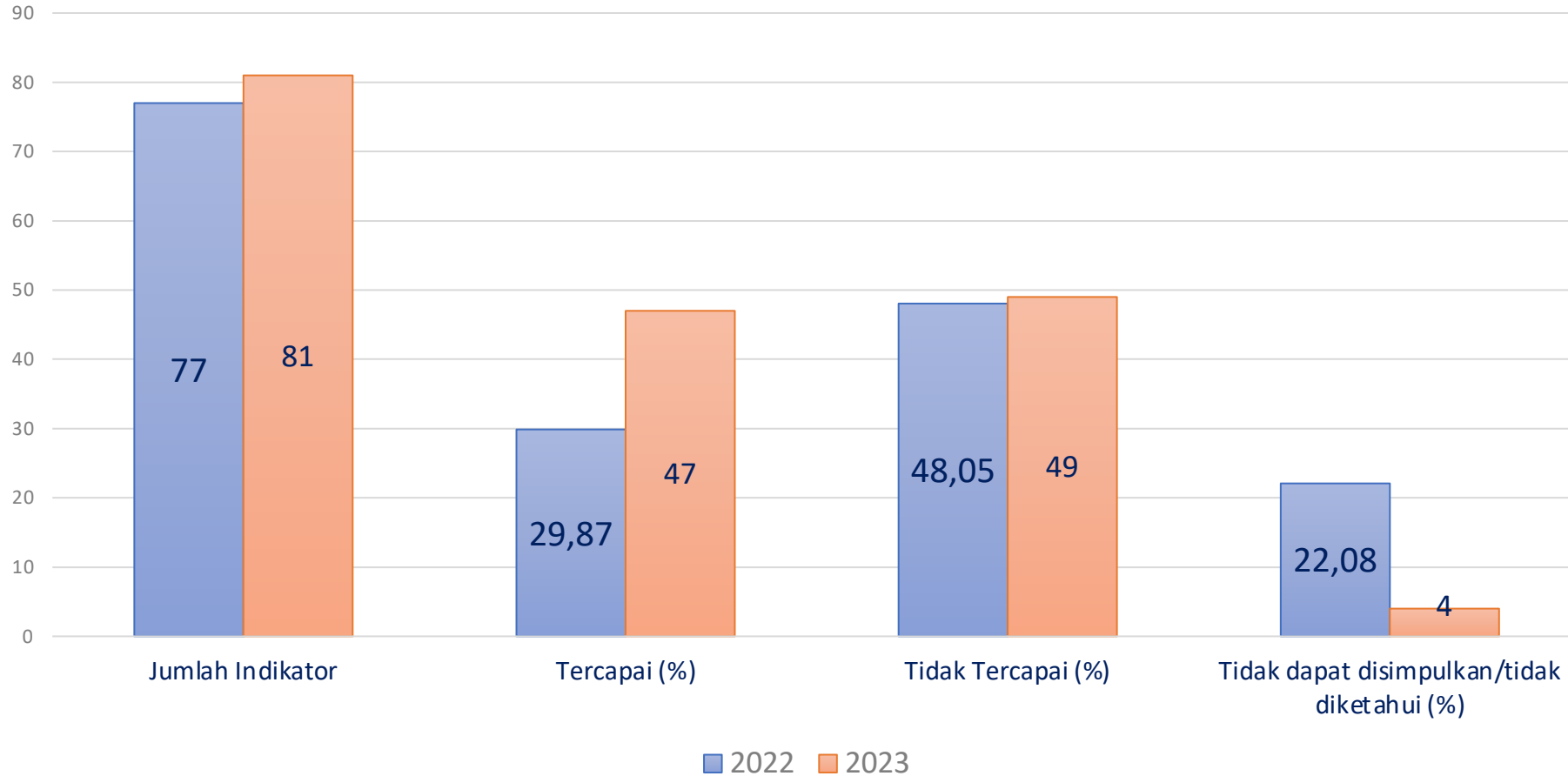
Capaian Prioritas Nasional RKP Tahun 2023



*) Pemetaan berdasarkan:

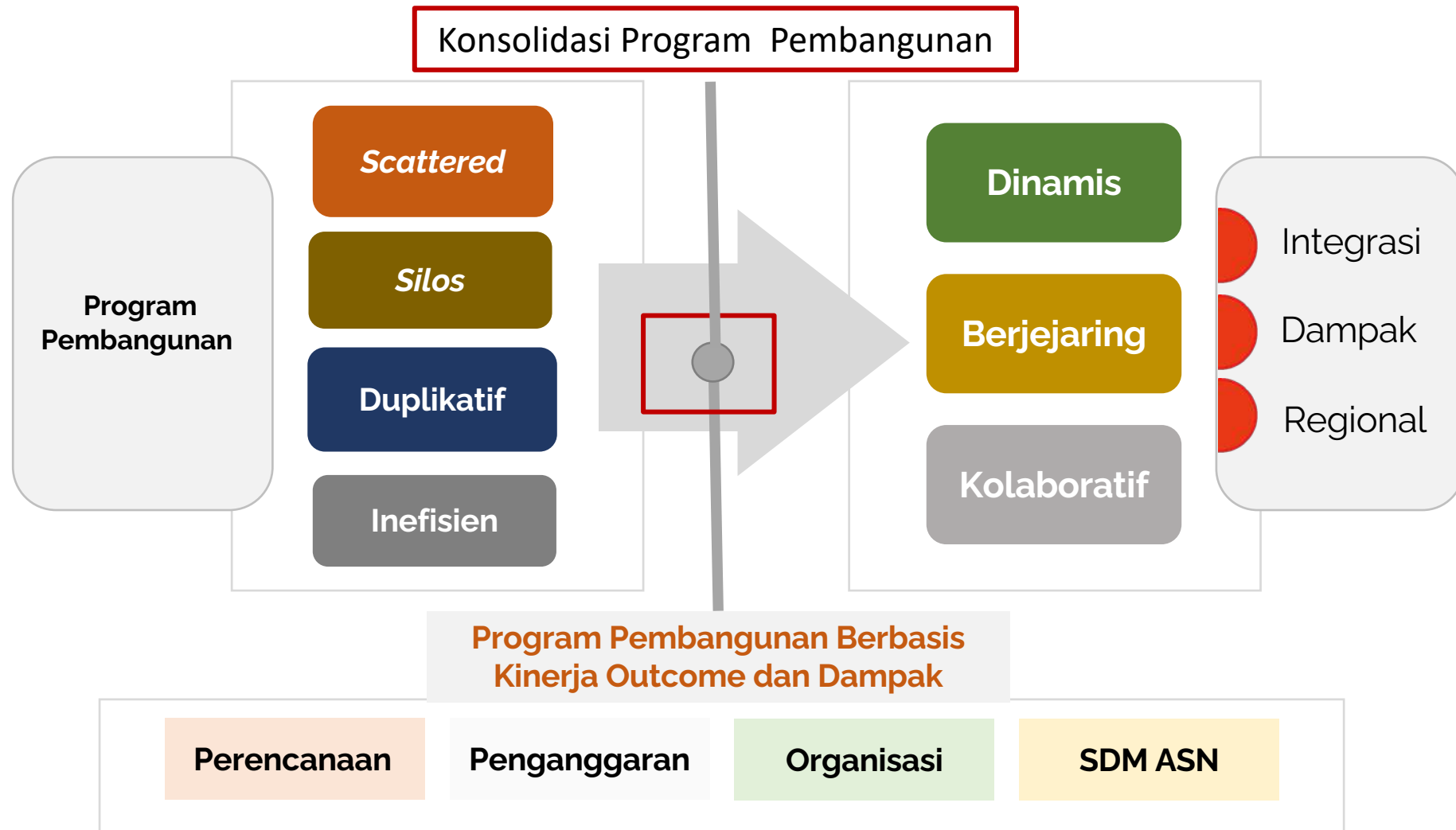
- 7 Prioritas Nasional
- 29 Sasaran Strategis
- 81 Indikator

Persentase Capaian Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2022-2023 (Bappenas, 2024)

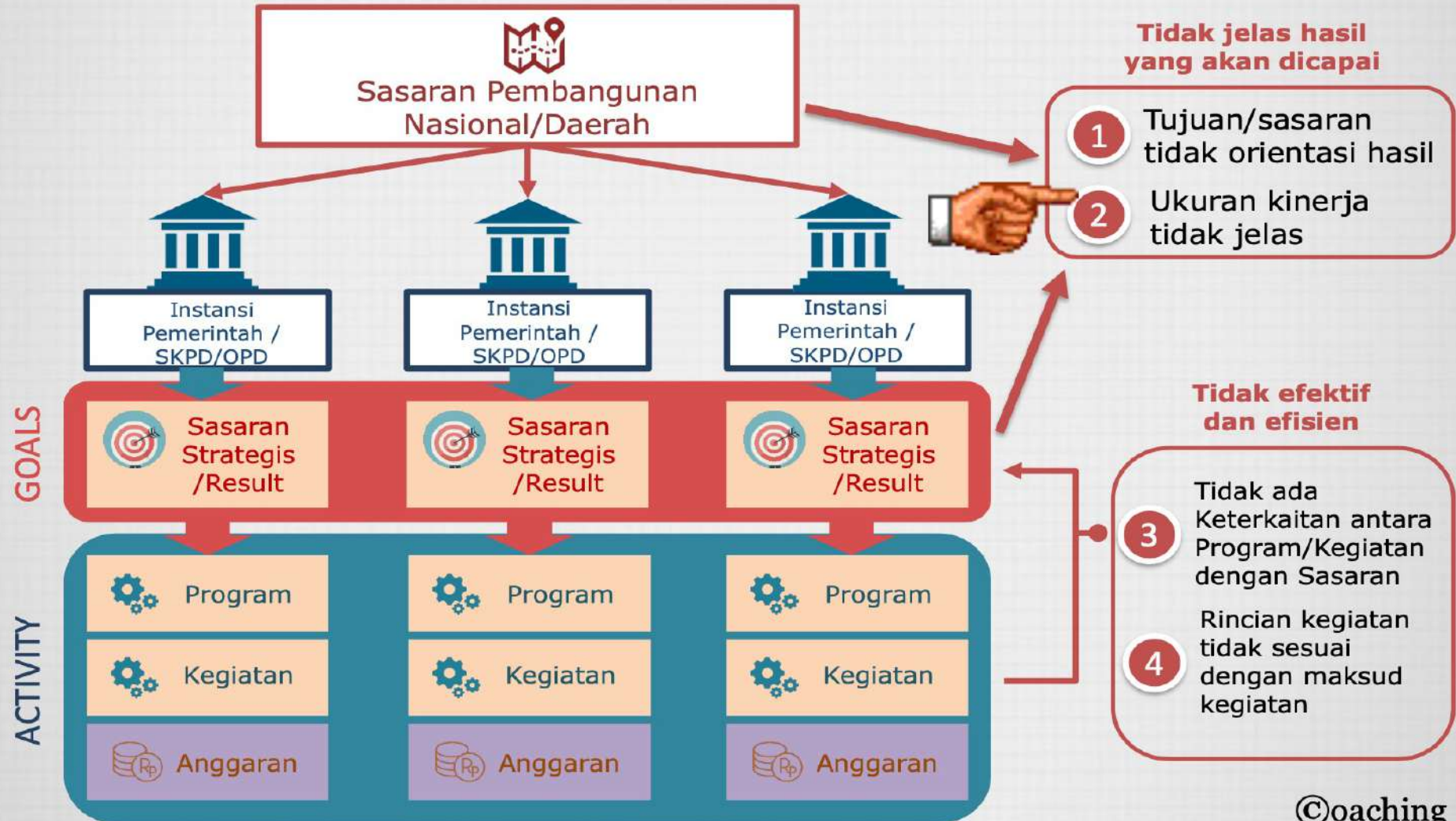


- Peningkatan ketercapaian PN: **17,13%**
- Penurunan ketidaktercapaian PN: **0,5%**
- Penurunan indikator PN tidak dapat disimpulkan/tidak diketahui: **18,08%**

Persoalan Kelembagaan dan Tata Kelola Pembangunan



PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL





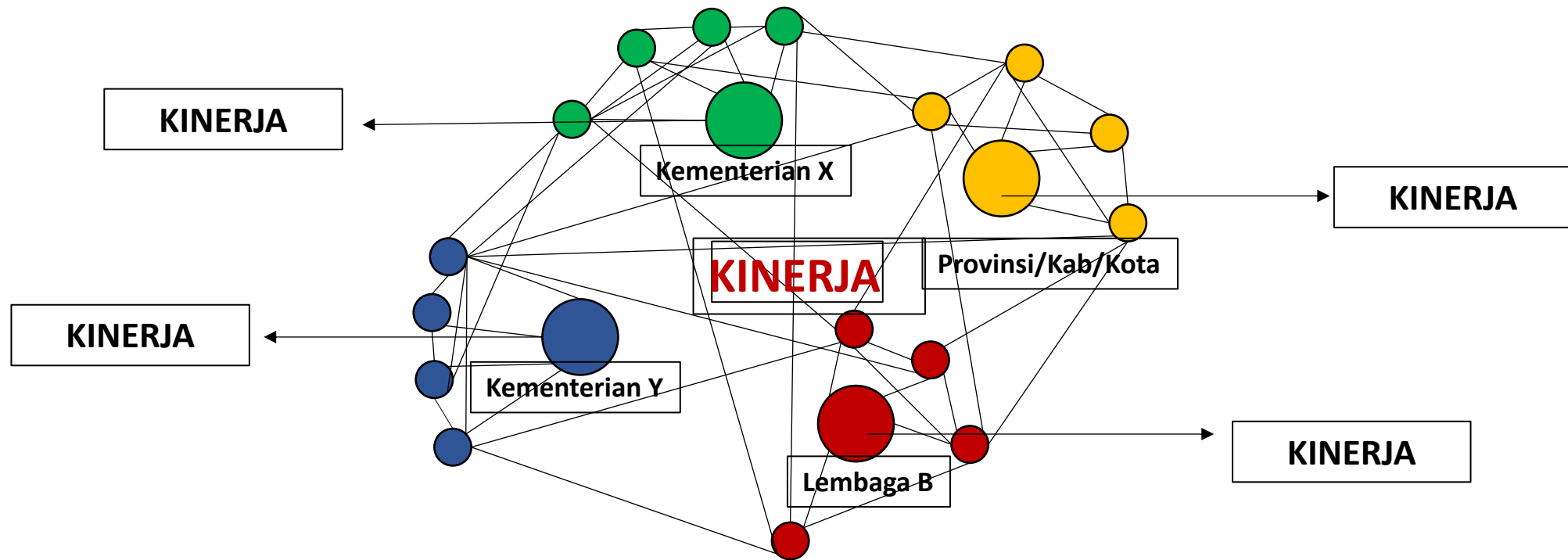
Isu Fundamental Pemerintahan: Bagaimana membangun Jaringan dan Kolaborasi antar K/L/Pemda

‘joined-up government’

‘holistic government’

“the whole of government”

PEMERINTAHAN BERJEJARING DAN BERKOLABORASI



1. Indikator kinerja pemerintah menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas instansi pemerintah
2. Instansi-instansi bekerja secara gotong-royong (whole-of-government) dalam sebuah network governance

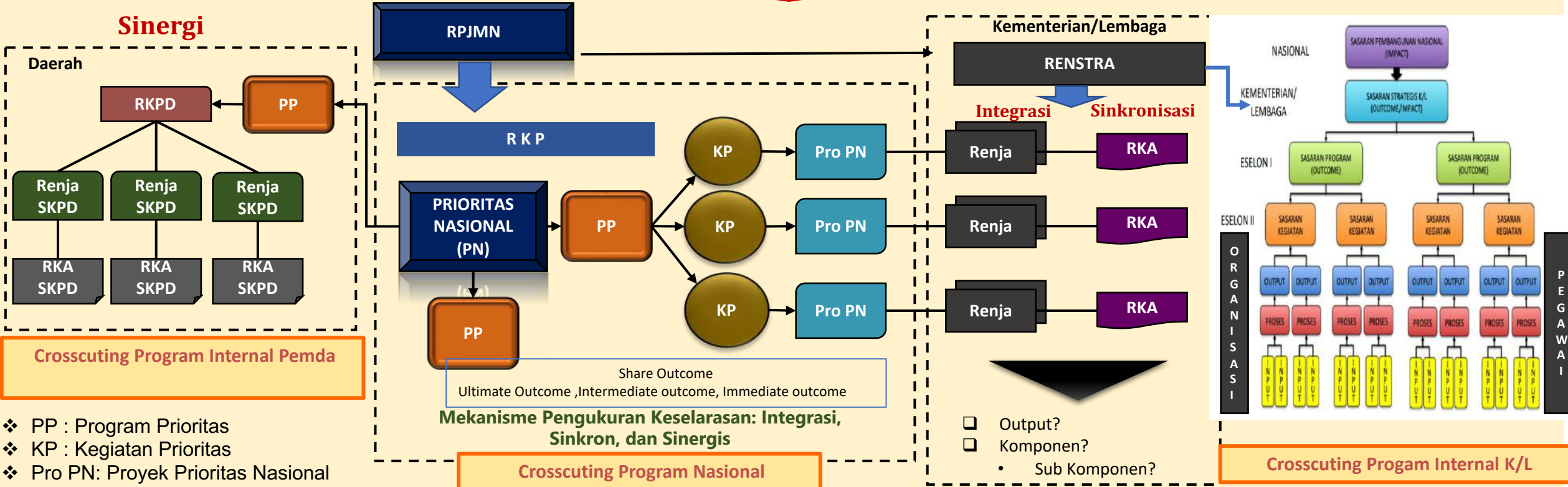
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)

PENAJAMAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI DALAM BERKONTIBUSI PADA SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Fokus pada program prioritas pembangunan nasional dan dipilih secara tematik
2. Prioritas pada K/L yang terkait mengawal program prioritas pembangunan nasional

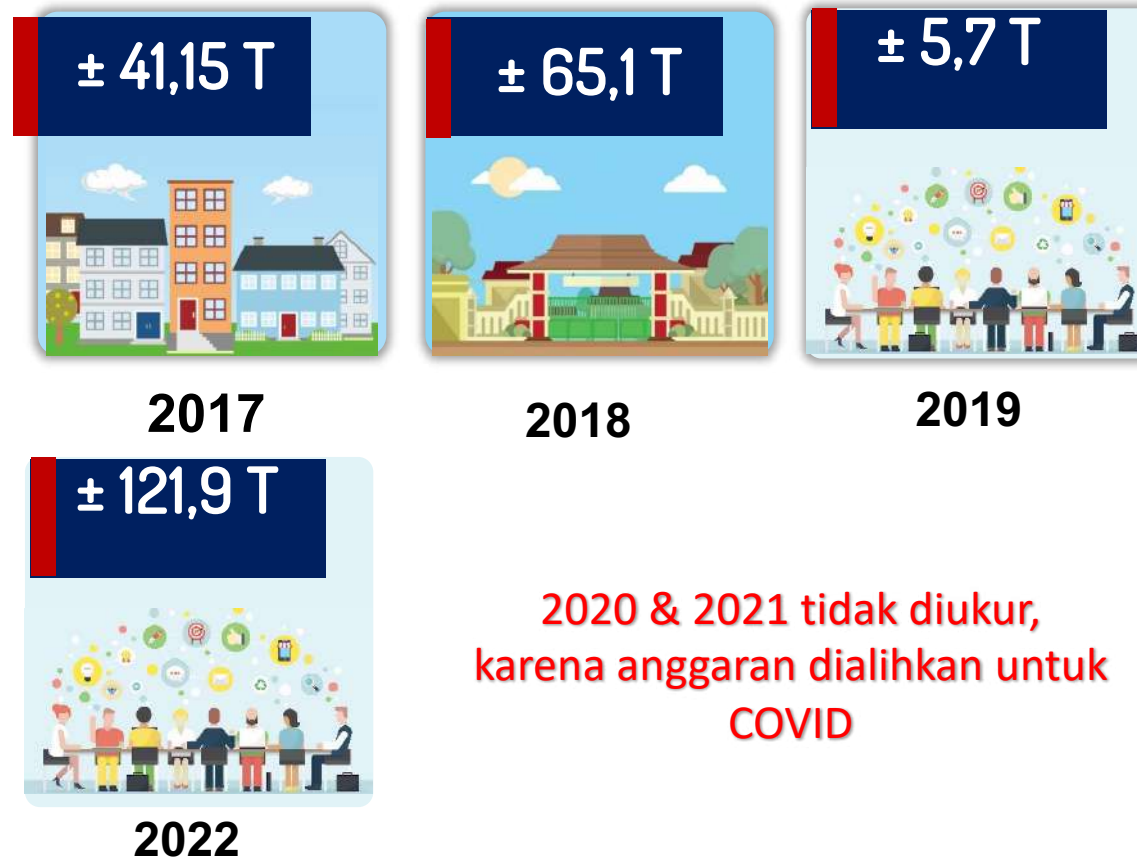


EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN APBN



- ❖ PP : Program Prioritas
- ❖ KP : Kegiatan Prioritas
- ❖ Pro PN: Proyek Prioritas Nasional

HASIL EFISIENSI INSTANSI PEMERINTAH DARI REFORMASI BIROKRASI SAKIP



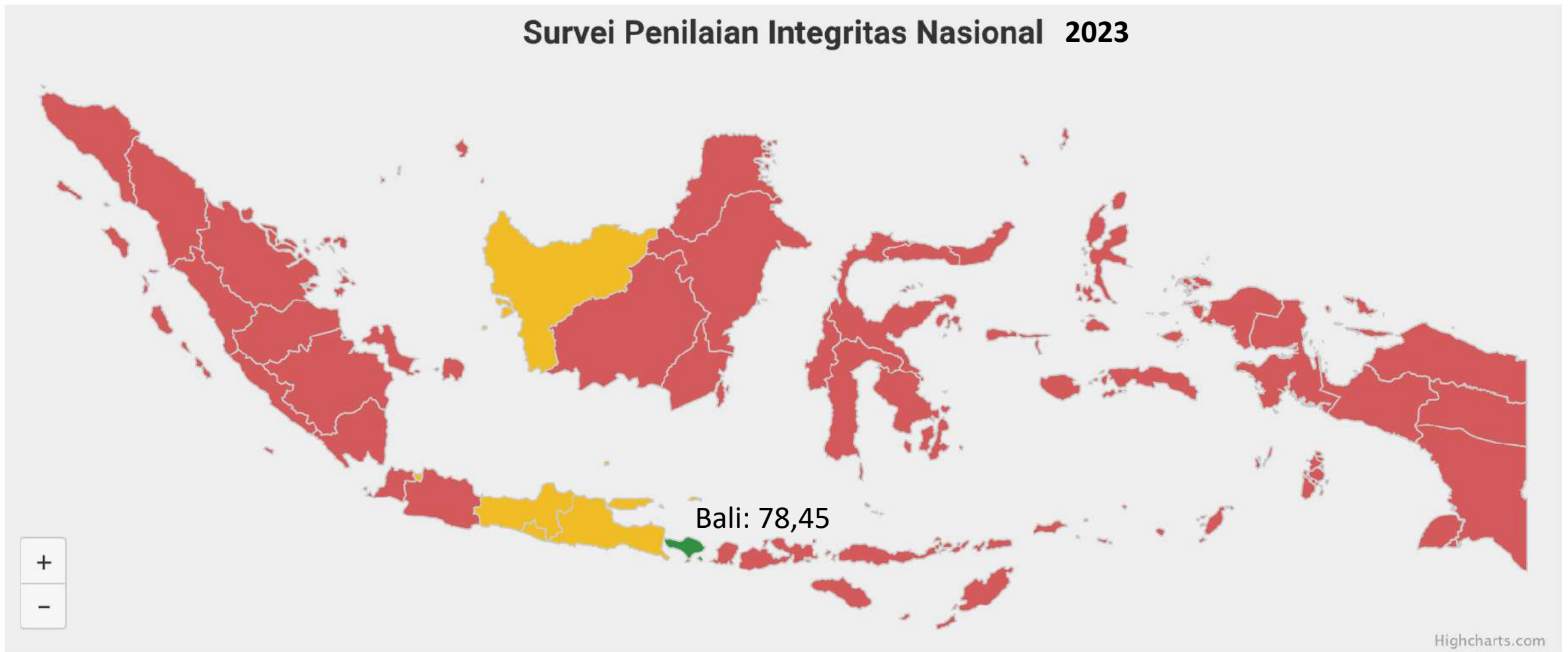
EFISIENSI DISEBABKAN OLEH: *(Sumber: Kemenpan, 2023)*

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. *Re-focusing* Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya *cross-cutting* program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA TAHUN 2013-2022



Survei Penilaian Integritas Nasional 2023



Highcharts.com



0-72.9

Rentan



73-77.9

Waspada



78-100

terJAGA

Indeks Nasional: 70,97

Rerata skor SPI seluruh K/L/PD di Indonesia

Skor SPI Pemda: 70,3

Dari total 541 instansi

Skor SPI K/L: 75,3

Dari total 88 instansi

Sumber: Jaga.id, 2024

HIGHLIGHT HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (2022)

SEBARAN RISIKO KORUPSI



**PENYALAHGUNAAN
FASILITAS KANTOR** **99%**
Instansi



**KORUPSI DALAM
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
(PBJ)** **100%**
Instansi



**KORUPSI DALAM
PROMOSI/
MUTASI SDM** **99%**
Instansi



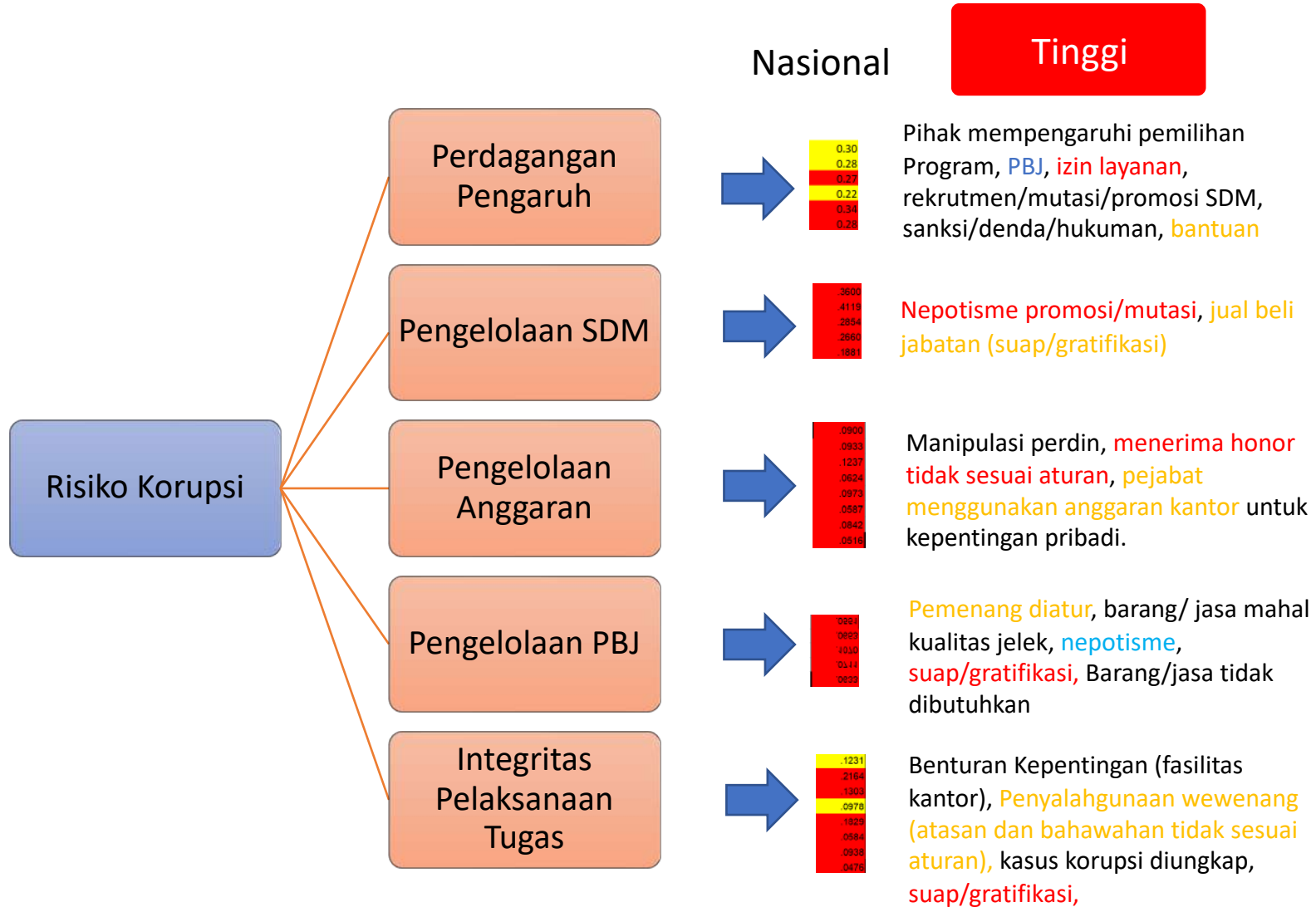
**SUAP/
GRATIFIKASI** **98%**
Instansi



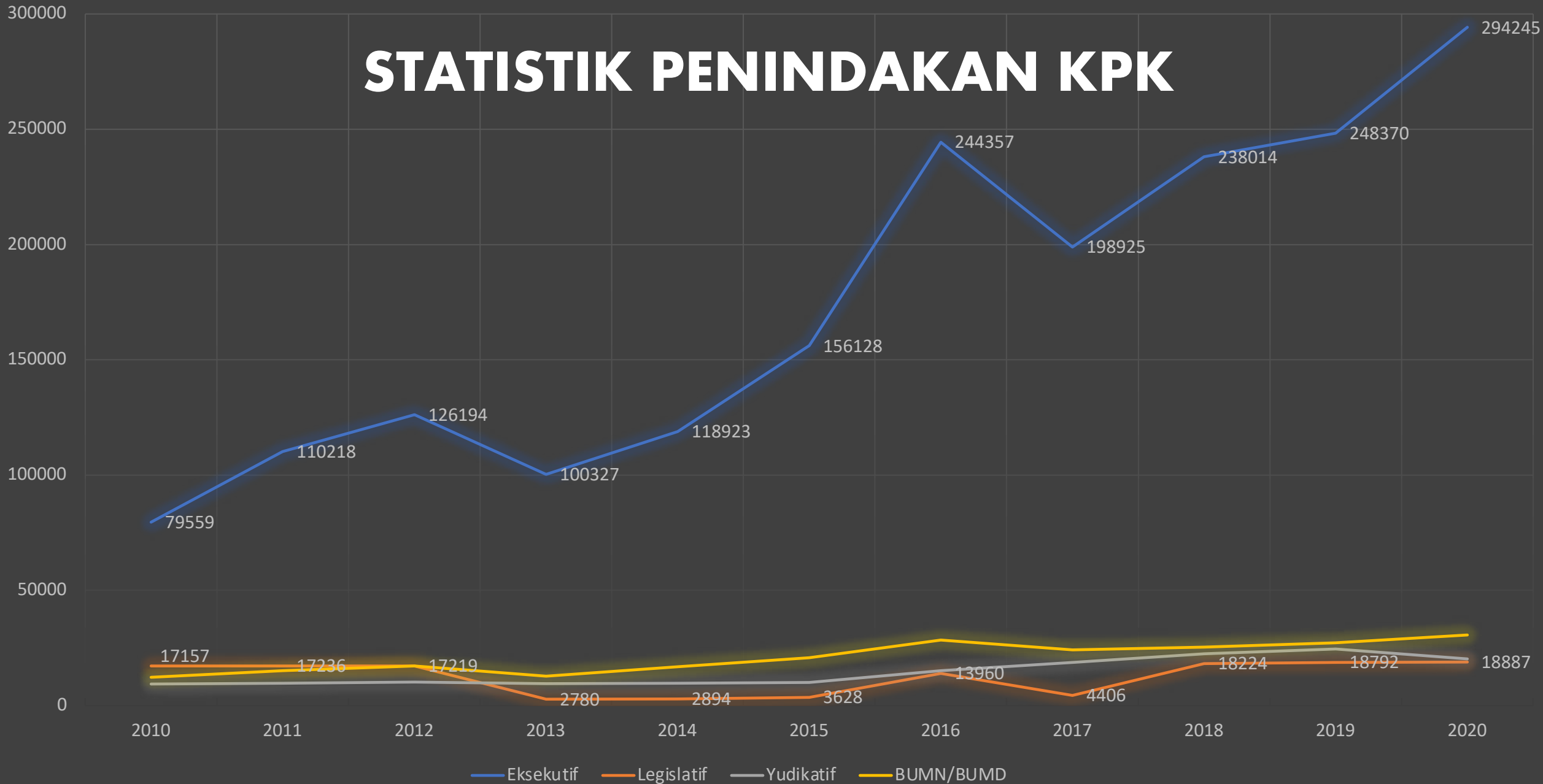
**INTERVENSI
(TRADING IN
INFLUENCE)** **99%**
Instansi

RISIKO KORUPSI

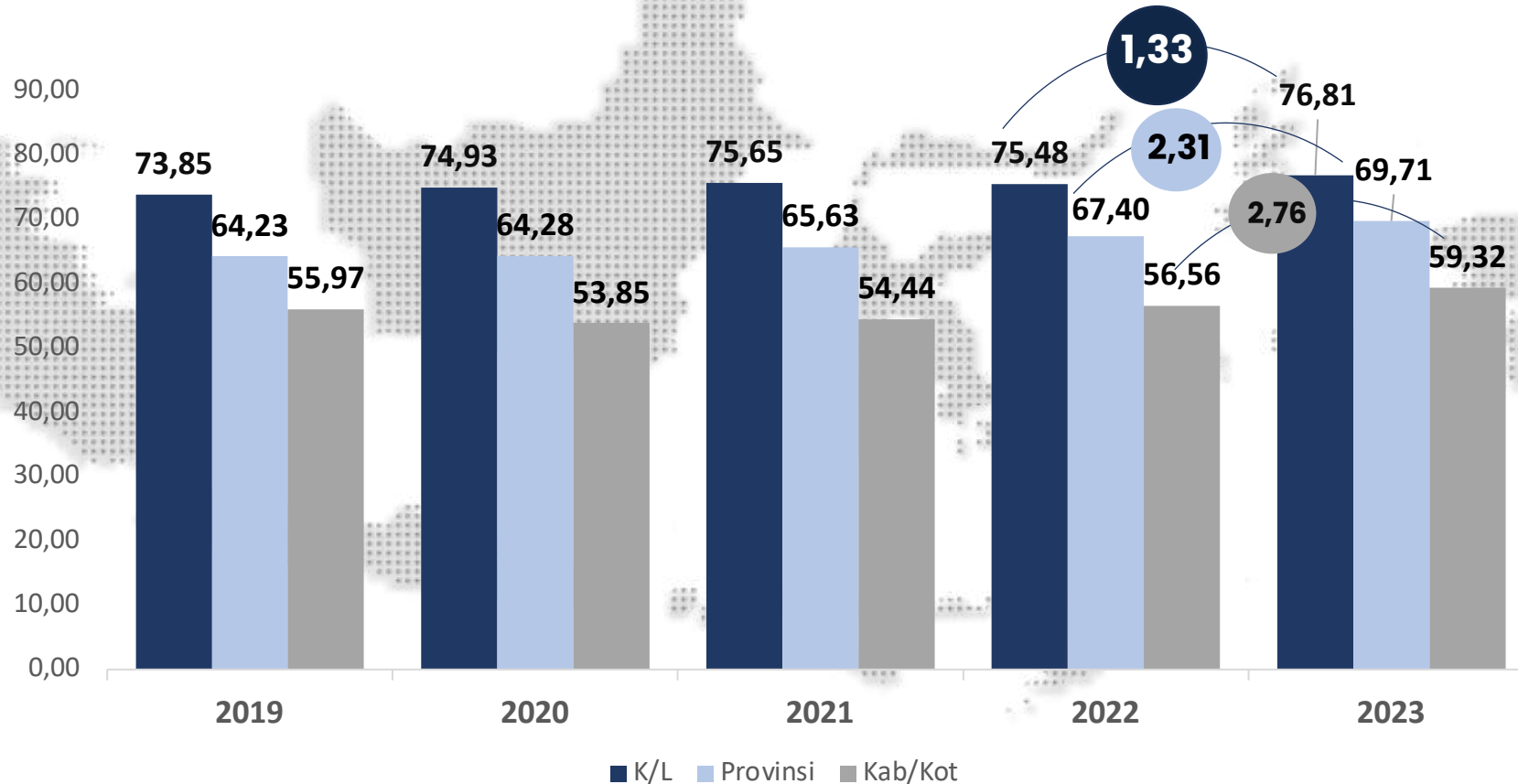
Penggunaan Hasil SPI Perspektif Internal (Pegawai)



STATISTIK PENINDAKAN KPK



Trend Rata-rata Indeks RB Lima Tahun Terakhir



INDEKS RB TERUS MENGALAMI PENINGKATAN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR.

REALISASI DAN CATATAN REFORMASI BIROKRASI

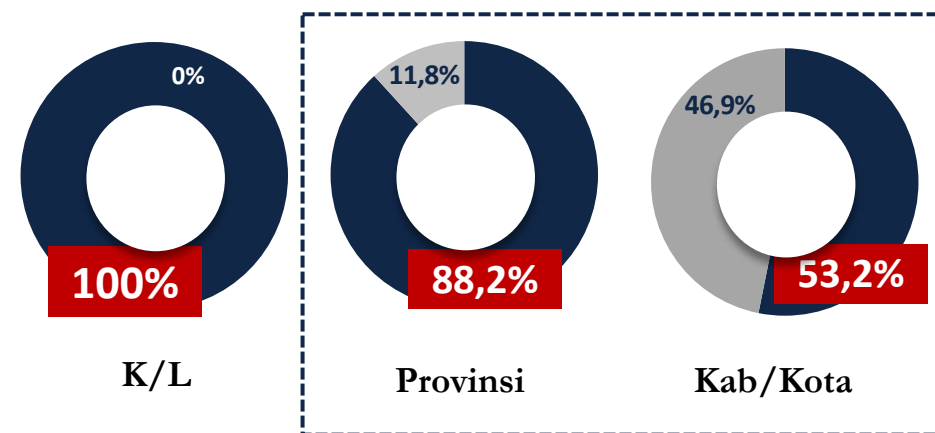
508 Kab/Kota Dievaluasi



BARU **53,15% PEMDA** KAB/KOTA YANG MEMILIKI NILAI RB DENGAN PREDIKAT MINIMAL “BAIK”. SEBAGIAN BESAR DIANTARANYA TERKONSENTRASI DI PULAU JAWA DAN BALI.

Catatan: Komitmen terhadap **RB Tematik** masih minim sehingga **belum berdampak pada pembangunan daerah**

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN INDEKS RB ‘BAIK’ KE ATAS TAHUN 2023



■ Nilai B ke atas

270 KAB/KOTA (53,15%) MENDAPATKAN PREDIKAT B KE ATAS

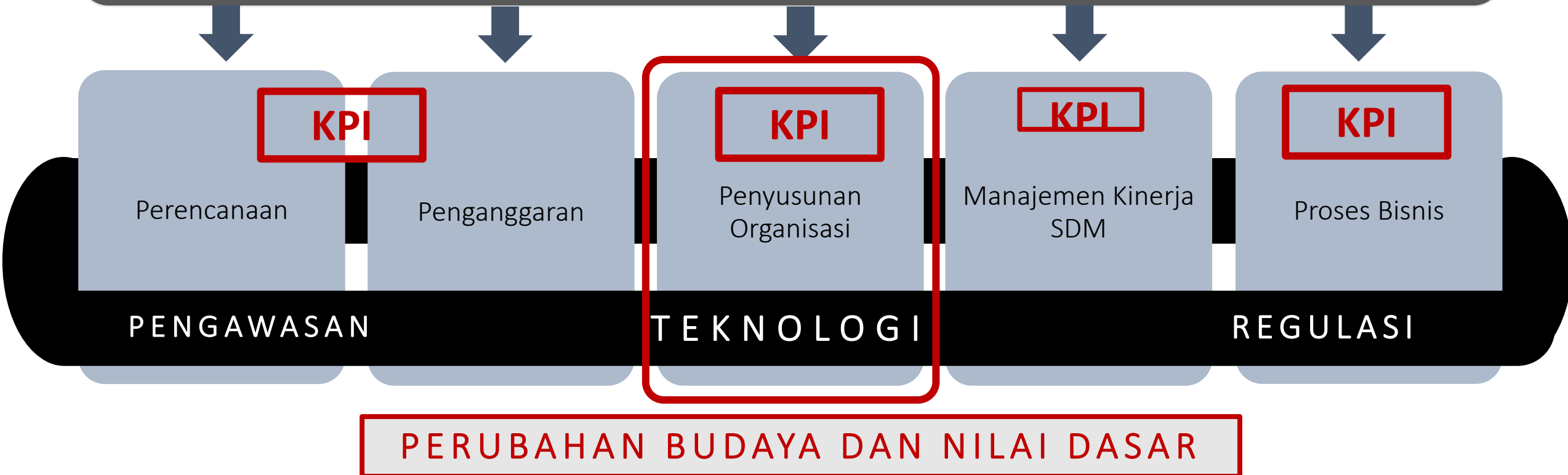
(99,18%) 121 Kab/Kota indeks RB minimal Baik dibandingkan dengan total 122 Kab/Kota di Jawa & Bali

(38,60%) 149 Kab/Kota di Luar Jawa & Bali Indeks RB minimal Baik dibandingkan dengan 386 Kab/Kota di Luar Jawa & Bali

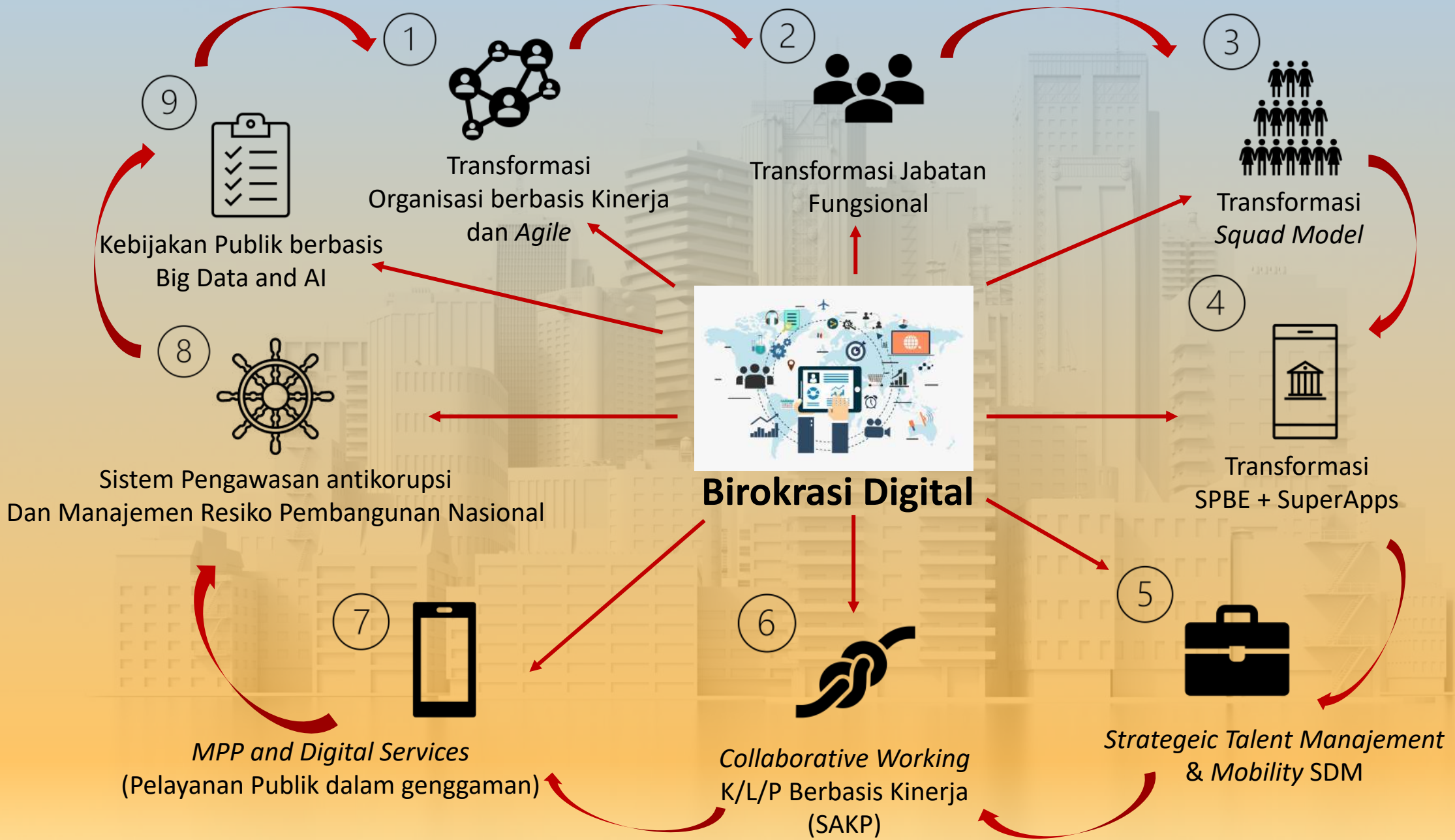


TRANSFORMASI BIROKRASI BERBASIS DAMPAK

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL

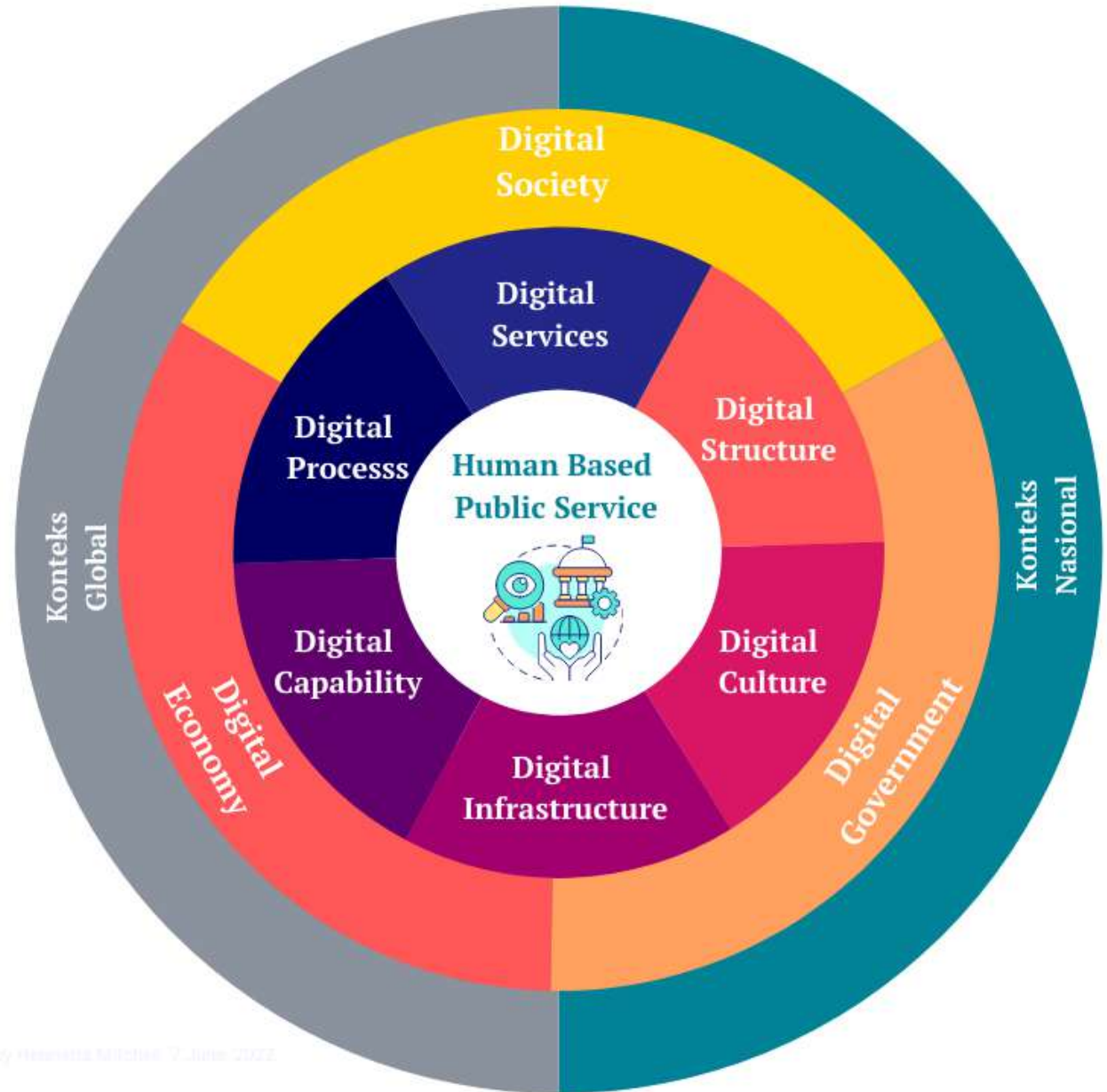


9 PROGRAM PERCEPATAN BIROKRASI DIGITAL INDONESIA (Bi Di) 2020-2024



FRAMEWORK 2025-2045

DIGITAL PLATFORM GOVERNANCE



Terima kasih

